

TESIS

**PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN OLEH
PENYIDIK POLRI PADA DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT**

AGUS RUSDI SUKANDAR, S.H

BP : 1220113051



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2017**

PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN OLEH PENYIDIK POLRI PADA DITREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

(AGUS RUSDI SUKANDAR, S.H, BP : 1220113051, Ilmu Hukum UNAND, 2017)

ABSTRAK

Kepolisian sebagai alat negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dibidang *yudikatif*, serta sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya. BAB III Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki beberapa tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh penyidik Polri Polda Sumbar dituntut oleh masyarakat untuk profesional, proposional dan kepastian hukum demi terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat dan kearifan lokal terhadap masyarakat adat minangkabau. Permasalahan yang dibahas adalah: 1) bagaimanakah proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana pertambangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar? 2) kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana pertambangan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penetapan tersangka oleh penyidik Polri Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya, kemudian data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis datanya secara kualitatif Hasil dan pembahasan bahwa penanganan kasus tindak pidana pertambangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dilaksanakan dengan gelar perkara secara internal Subdit IV Tipidter, karena kasus yang ditangani sebagian besar merupakan tertangkap tangan oleh penyidik, sedangkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan *Lex Specialist Derogat Lex generalie* sehingga penetapan tersangka seharusnya gelar perkara khusus dengan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan karena tambang merupakan hajat hidup masyarakat kearifan lokal setempat dengan mengalami kendala-kendala yaitu faktor internal yang terdiri dari kemampuan personal penyidik dan sarana prasarana serta faktor eksternal yaitu faktor hukumnya itu sendiri dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pertambangan, Penyidik Polri, Tersangka

DETERMINATION OF THE SUSPECT IN THE MINISTRY OF MINING BY THE POLRI INVESTIGATOR IN THE DIRECTORATE OF SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION POLICE WEST SUMATERA REGION

(AGUS RUSDI SUKANDAR, SH, BP: 1220113051, UNAND Legal Studies, 2017)

ABSTRACT

Police as a state tool in the Indonesian government system in the field of judicative, as well as Indonesia's criminal justice system Police institution is the first institution that is obliged to implement law enforcement, the Indonesian National Police (INP) as one of the institutions of law enforcement officers who carry out public service functions required to be able to provide the best service to the public by displaying the proportional unity and performance professionals. CHAPTER III Article 13 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, said that the police have some basic tasks, namely the maintenance of security and public order, Enforce the law and provide protection, shelter and service Community. Therefore, the handling of cases of mineral and coal mining crime pursuant to Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining by Police investigators West Sumatra Police is demanded by the public for professional, proportional and legal certainty for the sake of the creation of natural resources management that prosper the people of Sumatra West and local wisdom against Minangkabau indigenous peoples. The issues discussed are: 1) how the process of determining the suspect in the investigation of mining crime by the investigator Ditreskrimsus West Sumatra Police? 2) What are the constraints faced by investigators Ditreskrimsus West Sumatra Police in the process of determining the suspect in the investigation of criminal acts of mining? This research is empirical juridical research with Primary data includes data obtained directly in the field related to the determination of the suspect by the investigator Police Subdit IV Ditreskrimsus West Sumatra Police in the process of investigation of criminal acts of mining. While secondary data include legislation, the opinion of criminal law experts and criminal procedural law, and other literary materials, then data have been obtained from the results of research and then analyzed the data qualitatively Results and discussion that the handling of cases of mining crime by investigators Ditreskrimsus West Sumatra Regional Police is carried out with the title of the case of Subdit IV Tipidter, because the cases handled are mostly caught by the investigator, while Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal merupakan Lex Specialist derogat Lex generale so that the determination of the suspect should have his case specifically involving several pihakyang concerned because mine is the livelihood of the community local wisdom by experiencing constraints are internal factors that consist of personal ability investigator and Infrastructure and external factors, namely the legal factor itself and the legal awareness of the community.

Keywords: Ministry of Mining, Investigator Police, Suspect